

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1. Kajian Pustaka

##### 2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meekling (1976) dalam Ross *et al.*, (2002), Perusahaan merupakan tempat (fokus) bagi berbagai jenis hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual (keagenan) bisa terjadi antara pemegang saham sebagai pemilik dengan eksekutif sebagai pengelola, eksekutif dengan auditor, auditor dengan pemegang saham, eksekutif dengan kreditor, pemasok, ataupun pemerintah, dan lain-lain.

Menurut Besanko (2000), mengemukakan dua kondisi yang harus dipenuhi dalam kontrak keagenan adalah: pertama, agen harus menerima kontrak tersebut, kontrak tersebut harus menawarkan sesuatu yang lebih tinggi dari kesempatan (*opportunity*) yang dimiliki agen atau ambang batas upah minimum (*minimum threshold wage*). Kedua, agen harus mentaati apa yang tercantum dalam kontrak. Secara umum, prinsipal menghendaki agen bertindak secara efisien. Apabila agen memilih untuk tidak bertindak secara efisien, agen tersebut telah melalaikan apa yang tercantum dalam kontrak, mengelak dari tanggung jawab (*shirking*).

Menurut Besanko (2000), mengemukakan tiga kondisi harus dipenuhi untuk mencapai suatu kontrak yang ideal dari sudut pandang prinsipal. Pertama, prinsipal mengetahui secara pasti tindakan-tindakan efisien yang harus dilakukan agen (*no hidden action*), mengetahui secara pasti bagaimana hasilnya, serta agen tidak memiliki informasi yang disembunyikan (*no hidden information*). Kedua, dapat diamatinya seluruh tindakan agen dan hasilnya (*full information*). Ketiga, risiko yang ditanggung

agen relatif kecil, pembayaran dilakukan sepanjang agen tidak lalai (*an absence of risk*). Prinsipal mengharapkan agen melakukan tindakan-tindakan efisien tanpa membayar premi risiko merupakan hal yang sulit untuk dicapai.

Schroeder (1998) menyatakan asumsi yang mendasari teori keagenan adalah bahwa setiap individu akan memaksimalkan kepentingannya dengan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Kesulitan untuk mengamati segala tindakan agen serta tujuan yang berbeda antara agen dan prinsipal membuat agen tidak selalu bertindak seperti apa yang diinginkan prinsipal. Muncul masalah dalam hubungan keagenan akibat perilaku mementingkan diri sendiri (*moral hazard*).

#### **2.1.1.1. Asimetri Informasi (*Information Asymmetry*)**

Teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara eksekutif sebagai agen dan pemilik perusahaan (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai principal. Asimetri informasi terjadi ketika pihak yang satu mempunyai informasi yang lebih banyak dari yang lainnya.

Menurut Scott (2000), terdapat dua tipe asimetri informasi yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* terjadi ketika eksekutif lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan shareholder lainnya. Problem moral hazard muncul tatkala terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan. *Moral hazard* menimbulkan kepentingan eksekutif terhadap kebijakan akuntansi, hal ini diketahui dari adanya konsekuensi ekonomi yang timbul akibat tindakan yang diambil oleh eksekutif.

### 2.1.1.2. Konsekuensi Ekonomi (*Economic Consequences*)

Penyajian laporan keuangan yang tidak terlepas dari pertimbangan konsekuensi ekonomi serta adanya asimetri informasi mendorong timbulnya perilaku yang tidak semestinya (*disfunctional behavior*).

Zeff (1978) dalam Scott (2000) mendefinisikan konsekuensi ekonomi sebagai dampak pelaporan akuntansi pada perilaku pengambilan keputusan bisnis, pemerintah dan kreditur. Konsekuensi ekonomi menurut Scott (2000) adalah konsep yang menyatakan bahwa di luar implikasi teori pasar modal yang efisien, pemilihan alternative kebijakan akuntansi dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Perubahan kebijakan akuntansi, menurut argumentasi konsekuensi ekonomi, membawa pada kegiatan eksplorasi dan aktivitas pengembangan, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai perusahaan.

Menurut Scott (2000), berdasarkan teori keagenan yang mengimplikasikan adanya salah satu bentuk asimetri informasi, moral hazard, menjadikan pemahaman terhadap konsep konsekuensi ekonomi dalam pemilihan kebijakan akuntansi adalah penting untuk beberapa alasan yaitu: (1) banyak kejadian menarik dalam praktik akuntansi diturunkan berdasarkan konsekuensi ekonomi; (2) konsisten dengan pengalaman di dunia nyata; (3) timbulnya konsekuensi ekonomi mendorong penelitian mengenai bagaimana hal tersebut terjadi.

Alasan di atas menunjukkan bahwa konsekuensi ekonomi berkaitan dengan persoalan yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi. Teori Akuntansi Positif berusaha memahami mengapa suatu kebijakan akuntansi menimbulkan persoalan, dan memprediksi kebijakan akuntansi mana yang akan dipilih eksekutif.

### 2.1.2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Keberadaan konsekuensi ekonomi dapat dijelaskan melalui teori positif akuntansi. Arti kata positif sendiri memberikan arti sebagai suatu teori yang berusaha untuk membuat prediksi dengan baik atas peristiwa nyata. Menurut Scott (2000) mengatakan bahwa teori akuntansi positif berhubungan dengan prediksi seperti tindakan terhadap pilihan kebijakan akuntansi oleh suatu perusahaan dan bagaimana perusahaan akan merespon standar akuntansi yang baru.

Teori akuntansi positif memandang perusahaan sebagai *nexus of contract*, menggambarkan perusahaan sebagai tempat bagi berbagai jenis hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual (keagenan) antara berbagai pihak (manager, pemilik, kreditor, dan pemerintahan) banyak ditentukan atau diatur berdasarkan angka-angka akuntansi (*accounting numbers*) (Scott, 2000).

Hubungan keagenan tersebut mencakup perjanjian pinjaman (*bond covenants*), kompensasi eksekutif, dan kontrak-kontrak lainnya. Perjanjian pinjaman seringkali menentukan tingkat rasio, seperti rasio utang terhadap ekuitas, rasio laba terhadap pembayaran bunga, tingkat minimum ekuitas atau modal kerja yang diisyaratkan. Dalam hal kontrak dengan eksekutif, meliputi promosi dan renumerasi, menggunakan ukuran laba bersih dalam mengukur kinerja eksekutif. Kontrak dengan pemasok sangat tergantung pada likuiditas dan variabel keuangan lainnya (Scott, 2000).

Watts dan Zimmerman (1990), dalam Scott (2000) menginterpretasikan tiga hipotesis mengenai teori akuntansi positif sebagai berikut:

1. Hipotesis *bonus plans*

Eksekutif dengan *bonus plans* cenderung memilih prosedur akuntansi yang menggeser pelaporan laba periode mendatang menjadi laba periode berjalan. Eksekutif dengan *bonus plans* diduga akan memilih kebijakan akuntansi yang kurang konservatif dibanding dengan eksekutif tanpa *bonus plans*. Eksekutif dengan *bonus plans* akan menentang standar akuntansi yang mungkin melaporkan laba bersih lebih rendah. Eksekutif menggunakan laba akuntansi untuk menentukan besarnya bonus cenderung memilih kebijakan akuntansi yang memaksimalkan bonus yang diharapkan.

## 2. Hipotesis *debt covenant*

Perusahaan semakin mendekati pelanggaran akuntansi yang dijadikan dasar dalam perjanjian hutang, kemungkinan perusahaan akan memilih prosedur akuntansi yang menggeser pelaporan laba periode mendatang menjadi laba periode berjalan. Perusahaan dengan rasio hutang terhadap modal yang tinggi akan memilih kebijakan akuntansi yang kurang konservatif dibanding perusahaan dengan rasio hutang terhadap modal yang rendah, dan cenderung menentang standar akuntansi baru yang membatasi kemampuan mereka untuk memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan. Berkaitan dengan syarat-syarat pinjaman yang harus dipenuhi, perusahaan dengan rasio utang tinggi, cenderung memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba bersih.

## 3. Hipotesis *political cost*

Semakin besar biaya politik yang dihadapi perusahaan, maka kemungkinan besar eksekutif akan memilih prosedur akuntansi yang menunda perolehan laba periode berjalan menjadi laba periode yang akan datang. Eksekutif dari perusahaan besar

akan memilih kebijakan akuntansi yang lebih konservatif dibandingkan dengan eksekutif dari perusahaan kecil, dan cenderung mendukung standar akuntansi baru yang mungkin akan melaporkan laba bersih lebih rendah.

Hipotesis di atas mengimplikasikan bahwa *Positive Accounting Theory* (PAT) mengakui tiga bentuk hubungan keagenan yaitu : (1) antara eksekutif dan pemilik; (2) antara eksekutif dan kreditur; (3) antara eksekutif dan pemerintah.

Dalam konteks ini tujuan utama PAT adalah untuk menerangkan dan meramalkan pilihan eksekutif terhadap metode dan prosedur akuntansi. PAT mencoba menganalisis biaya serta manfaat pengungkapan informasi keuangan bagi komunitas yang memerlukan informasi akuntansi. Asumsi yang mendasari adalah semua komunitas yang berkepentingan dengan perusahaan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingannya.

### **2.1.3. Arti Manajemen Laba**

Secara lengkap Healy dan Wahlen (1998) mendefinisikan manajemen laba:

*“Earnings management occurs when managers use judgement in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company, or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers”*

Definisi di atas mencakup berbagai *judgment* baik dalam hal penyusunan laporan keuangan maupun dalam hal pemilihan transaksi yang pada akhirnya akan mempengaruhi laporan keuangan. Banyak cara di mana eksekutif dapat melakukan *judgment* untuk mempengaruhi pelaporan keuangan. *Judgment* diperlukan dalam hal mengestimasi kejadian-kejadian ekonomis masa mendatang yang terrefleksikan dalam

laporan keuangan. Eksekutif harus melakukan pemilihan metode akuntansi yang diterima umum untuk melaporkan transaksi ekonomi yang sama. *Judgment* juga dilakukan dalam hal manajemen modal kerja. Eksekutif harus memutuskan bagaimana transaksi perusahaan akan dilaksanakan.

Penggunaan *judgment* dalam penyusunan laporan keuangan oleh eksekutif memiliki biaya dan manfaat. Biaya tersebut berupa kekeliruan dalam mengalokasikan sumber potensial akibat dilakukannya manajemen laba. Manfaat yang diperoleh berupa peningkatan dalam hal mengkomunikasikan informasi privat kepada *external stakeholders*. Healy dan Wahlen (1998).

Menurut Mulford dan Comiskey (2002) mengklasifikasikan manajemen laba sebagai salah satu jenis permainan angka keuangan (*financial numbers game*). Menurut Mulford dan Comiskey (2002) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

*“Earnings management is the active manipulation of accounting results for the purpose of creating an altered impression of business performance”*

Definisi di atas menjelaskan bahwa tindakan aktif memanipulasi laba untuk mencapai target telah ditentukan terlebih dahulu oleh eksekutif ataupun analis pasar modal untuk mencapai suatu jumlah yang konsisten atau merata dari aliran laba yang terus menerus dan dapat dipertahankan.

Scott (2000) mendefinisikan manajemen laba sebagai pemilihan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Scott (2000), terdapat dua cara yang saling melengkapi dalam memikirkan manajemen laba. Pertama, bentuk oportunistik (*opportunistic form*) dan bentuk efisiensi (*efficiency form*). Bentuk oportunistik mengasumsikan bahwa eksekutif akan memilih kebijakan akuntansi untuk

memaksimalkan harapan mereka yang berhubungan dengan renumerisasi, perjanjian pinjaman, dan biaya politik. Bentuk efisiensi mengasumsikan bahwa sistem pengendalian internal yang meliputi monitoring oleh dewan direksi, membatasi faham oportunistis, dan memotivasi eksekutif untuk memilih kebijakan akuntansi yang meminimalkan biaya kontrak.

#### **2.1.4 Motivasi Manajemen Laba**

Pengujian atas keberadaan manajemen laba dapat dilakukan dengan menggunakan model-model statistik ataupun studi deskriptif. Sebagian besar pengujian dengan menggunakan model statistik dilakukan untuk mengestimasi apakah pola *unexpected accruals* konsisten dengan insentif eksekutif dalam melakukan manajemen laba. Manajemen laba, baik dilakukan masih dalam lingkup Standar Akuntansi yang berlaku umum maupun tidak dilakukan dengan maksud tertentu dan sebagai respon atas kondisi tertentu yang memotivasi terjadinya manajemen laba dan adanya insentif untuk mengelola laba (Mulford dan Comiskey, 2002).

Menurut Scott (2000) ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba seperti motivasi bonus, motivasi kontrak lainnya, motivasi politik, motivasi pajak, perubahan *chief executive officer*, *Initial Public Offering* dan mengkomunikasikan informasi ke investor.

Menurut Healy (1985) dalam Scott (2000), motivasi kontrak (*contractual motivations*) muncul karena perjanjian antara eksekutif dengan perusahaan yang berbasis pada kompensasi manajerial (*managerial compensation*) dan perjanjian utang (*debt covenant*). Motivasi bonus merupakan dorongan bagi eksekutif perusahaan dalam



melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut.

Healy (1985) dalam Scott (2000) melakukan penelitian mengenai manajemen laba menggunakan hipotesis *bonus plan* dengan pola *taking a bath*. Adanya ekspektasi terhadap perilaku total akrual yaitu penurunan atau peningkatan laba. Jika laba di atas *cap*, jumlah maksimum penghasilan bonus tercapai, maka dapat diprediksi kebijakan akrual yang menurunkan laba akan diambil. Karena maksimum bonus telah diperoleh, adanya tambahan laba melebihi *cap* tidak akan memperoleh tambahan bonus. Kebijakan yang sama akan diambil apabila laba di bawah *bogey*, jumlah minimum laba yang harus dicapai untuk memperoleh bonus (*taking a bath*), sehingga akan meningkatkan probabilitas perolehan bonus untuk periode selanjutnya. Kebijakan akrual yang meningkatkan laba akan diambil apabila diprediksi laba berada di antara *bogey* (tingkat laba minimum untuk mendapat bonus minimum) dan *cap* (tingkat laba tertentu untuk mendapat bonus maksimum). Dalam hal ini, apabila laba meningkat maka akan meningkatkan bonus.

Selanjutnya, Healy (1985) menjelaskan peningkatan laba juga akan dilakukan apabila laba agak sedikit di bawah *bogey*, sehingga bonus minimal dapat diperoleh. Penelitian awal yang dilakukan Healy dikritisi dengan mengasumsikan bahwa perubahan akrual yang terjadi semuanya adalah *discretionary*.

Menurut Guidry, Leone, dan Rock dalam Mulford dan Comiskey (2002) menyimpulkan hal yang sama dengan Healy yaitu eksekutif bisnis unit melakukan manipulasi laba dalam usahanya untuk memaksimalkan perencanaan bonus jangka pendek.

Scott (2000) menyimpulkan, walaupun secara metodologi masih ada keraguan, adanya bukti signifikan bahwa eksekutif menggunakan akrual untuk mengelola laba dalam usahanya memaksimalkan bonus, khususnya pada saat laba tinggi. Motivasi manajemen laba yang dilakukan karena adanya perjanjian pinjaman jangka panjang (*debt covenant*) khususnya untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman, seperti pembayaran dividen secara berlebihan, melakukan pinjaman tambahan atau membiarkan modal kerja atau ekuitas pemegang saham berada pada di bawah level yang telah ditentukan. Manajemen laba dilakukan sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam kontrak hutang. Perusahaan yang melanggar akan menanggung beban yang cukup berat.

Studi manajemen laba yang dilakukan, DeFond dan Jiambalvo (1994) dan Sweeney (1994) dalam Healy dan Wahlen (1998) dengan menggunakan sampel perusahaan yang melakukan pelanggaran, menemukan bukti bahwa eksekutif akan melakukan manajemen laba dengan meningkatkan laba sesaat sebelum atau setelah periode pelanggaran perjanjian.

Healy dan Wahlen (1998) mengemukakan tiga bentuk motivasi regulasi sebagai pemicu terjadinya praktik manajemen laba yaitu manajemen laba dilakukan untuk mengelak terhadap regulasi industri, mengurangi resiko investigasi maupun intervensi oleh regulator anti trusth, dan yang terakhir adalah untuk tujuan perencanaan pajak.

Regulasi perbankan yang mengharuskan tingkat *capital adequacy requirements* tertentu, regulasi asuransi yang mengharuskan dipenuhinya aturan kondisi kesehatan minimum, keduanya sangat erat kaitannya dengan data-data akuntansi. Setiawati (1999) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa nilai *discretionary accrual* bank yang

mengalami penurunan skor kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *discretionary accrual* bank yang tidak mengalami penurunan skor kesehatan. Hal ini mengindikasikan bahwa bank yang mengalami penurunan skor kesehatan memilih kebijakan akrual yang dapat meningkatkan laba. Bank termotivasi untuk melakukan manajemen laba karena apabila skor kesehatan bank jelek akan berakibat mendapat penilaian yang jelek oleh Bank Indonesia atau bahkan dapat dilikuidasi. Adanya konsekuensi ekonomis, pengenaan sanksi oleh Bank Indonesia, menjadi pemicu dilakukannya manajemen laba dalam menghadapi regulasi industri perbankan.

Penelitian mengenai manajemen laba dengan menggunakan pendekatan distribusi frekuensi yang dilakukan di luar Indonesia oleh Burgstahler dan Dichev (1997), Degeorge *et al.*, (1999), Myers dan Skinner (1999). Ketiga hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama yaitu adanya manajemen laba, sekitar titik nol; secara lebih spesifik, dapat dikatakan bahwa terdapat jumlah observasi yang terlalu sedikit pada posisi agak sedikit di bawah nol, sebaliknya jumlah observasi dalam jumlah cukup besar pada posisi agak sedikit di atas nol. Hasil temuan ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari pelaporan laba negatif, penurunan laba, dan kegagalan mencapai ekspektasi analis. Terjadinya manajemen laba dapat diketahui dengan adanya respon eksekutif terhadap ambang batas (*threshold*).

Pendekatan distribusi frekuensi (*Frequency Distribution Approach*) tidak perlu melakukan estimasi atas *normal* dan *abnormal accruals*, yang mana pengujian hanya dilakukan pada terjadinya manajemen laba pada ambang batas (*threshold*) tertentu. Pengujian keberadaan manajemen laba melalui pendekatan ini memberikan bukti yang

menyakinkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan motivasi untuk mengantisipasi kerugian yang akan dilaporkan, penurunan atas laba yang dilaporkan, ataupun kegagalan mencapai ekspektasi investor (Healy dan Wahlen, 1998).

Secara lebih umum, DeGeorge *et al.*, (1999) mengemukakan bahwa eksekutif melakukan manajemen laba untuk mempengaruhi persepsi pihak luar (*outsiders*) seperti investor, bank, pemasok, dan untuk mencapai *private payoff*. Pihak luar memanfaatkan ambang batas (*threshold*) sebagai standar untuk menilai dan memberikan penghargaan kepada eksekutif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menganalisa *discretionary accruals*, penelitian yang dilakukan DeGeorge *et al.*, (1999) dan Burgstahler dan Dichev (1997), menunjukkan bahwa manajemen laba dapat diketahui sebagai respon eksekutif terhadap ambang batas. Mereka menganggap bahwa jika eksekutif memiliki insentif yang kuat untuk mencapai laba melampaui ambang batas, maka distribusi laba atas sejumlah laba yang sedang diamati pada posisi agak di bawah ambang batas, jumlahnya akan lebih sedikit dari jumlah yang diharapkan. Demikian sebaliknya, jumlah perusahaan yang diamati akan lebih banyak dari yang diharapkan apabila posisinya berada di atas ambang batas.

Menurut Myers dan Skinner (1999) dengan menggunakan pendekatan yang sama menemukan bukti kuat adanya manajemen laba, yaitu laba kuartalan yang secara berturut-turut meningkat, frekuensinya lebih besar daripada yang diharapkan.

DeGeorge *et al.*, (1999), secara eksplisit menggunakan istilah ambang batas. Ambang batas ini dimanfaatkan pihak luar untuk menilai kinerja dan memberi

penghargaan kepada eksekutif. Kondisi demikian akan memotivasi eksekutif untuk melakukan praktik manajemen laba.

Penelitian DeGeorge *et al.*, (1999), yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini, terhadap 5,387 perusahaan yang sahamnya tercatat di New York Stock Exchange dalam kurun waktu 22 tahun (tahun 1974 sampai 1996), menemukan adanya indikasi manajemen laba pada ambang batas tertentu.

Melalui model yang diajukan, model dua periode, DeGeorge *et al.*, (1999) menunjukkan adanya usaha untuk mencapai ambang batas sehingga memunculkan pola manajemen laba yang khusus. Laba yang mendekati ambang batas akan diatur sedemikian rupa sehingga mencapai ambang batas.

Berbeda dengan penelitian Burgstahler dan Dichev (1997), DeGeorge *et al.*, (1999) tidak melakukan estimasi berapa jumlah frekuensi yang diharapkan terjadi pada ambang batas sekitar titik nol. Lonjakan yang terjadi sebelum mencapai ambang batas dihitung melalui perubahan probabilitas sebelum mencapai nilai positif.

Data keuangan triwulanan yang digunakan oleh DeGeorge *et al.*, (1999) menggunakan uji statistik t, di mana dalam melakukan pengujian, interval yang sedang diamati tidak diikutsertakan dalam perhitungan uji statistik t. Hasil uji statistik t membuktikan adanya diskontinuitas pada masing-masing distribusi laba. Lonjakan cukup signifikan pada titik sebelum mencapai nilai positif menunjukkan adanya respon eksekutif terhadap ambang batas yang ditetapkan pihak luar dalam menilai kinerja dan memberikan penghargaan.

### 2.1.5. Model Ambang Batas (*Threshold Model*)

Manajemen laba terjadinya dapat terjadi sebagai respon eksekutif terhadap ambang batas (*threshold*). Eksekutif memfokuskan pada ambang batas laba karena pihak - pihak yang berkepentingan terhadap kelangsungan operasi perusahaan sangat memperhatikan kinerja. Sedikitnya terdapat tiga hal yang berasal dari pengaruh psikologis, yang menyebabkan munculnya perhatian terhadap ambang batas (DeGeorge *et al.*, 1999).

Pertama, adanya hal mendasar mengenai jumlah positif dan bukan positif (*negative*) dalam proses berpikir manusia. Klasifikasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menetapkan ambang batas melalui penetapan laba secara absolut. Pada saat memperhatikan laba kuartalan tahun sebelumnya atau ramalan hasil konsensus analisis sebagai *benchmark*, terdapat sesuatu yang penting yaitu pemilahan antara berhasil atau gagal mencapai norma. Norma dijadikan sebagai fokus, yang memperkuat sifat-sifat psikologis.

Kedua, berdasarkan *prospect theory*, individu melakukan pemilihan di antara berbagai alternative yang mengandung resiko, dan mengevaluasi hasilnya sebagai perubahan atas *reference point* (Kahneman dan Tversky, 1979 dalam DeGeorge, 1999). *Reference point* biasanya mencakup beberapa aspek dari pernyataan yang dibuat oleh pengambil keputusan (misalnya: *wealth*) dan berubah sepanjang waktu, kadang tergantung pada bagaimana keputusan dibuat. Jika preferensi dewan komisaris yang melakukan evaluasi terhadap eksekutif, atau investor yang memperdagangkan saham perusahaan konsisten dengan prediksi menurut *prospect theory*, maka eksekutif memiliki ambang batas yang berkaitan dengan skedul reward (*threshold-related reward*

*schedule*) dan kemungkinan melakukan manajemen laba sebagai respon terhadap ambang batas. Ambang batas yang diharapkan eksekutif untuk dicapai merupakan *reference point* yang merupakan fungsi nilai dari partisipan.

Ketiga, ambang batas menjadi penting karena dianggap sebagai *rule of thumb* untuk mengurangi biaya transaksi. Penggunaan ambang batas sebagai alat pengukur kinerja digunakan secara bervariasi, baik untuk memutuskan pemberian pinjaman, memberikan rekomendasi atas transaksi saham, atau promosi *Chief Executive Officer*. Pada saat eksekutif gagal mencapai tingkat laba sesuai dengan yang telah diproyeksikan, dewan komisaris menganggap kinerja eksekutif buruk, sehingga bonus dan opsi saham yang diterima mungkin tidak sebesar yang diharapkan.

Tiga ambang batas yang menjadi tujuan eksekutif dalam pencapaian laba perusahaan pada saat penyusunan laporan keuangan (DeGeorge *et al.*, 1999) :

- (a) Melaporkan laba positif;
- (b) Melaporkan laba yang lebih tinggi dibandingkan laba tahun sebelumnya;
- (c) Memenuhi prediksi laba dari analisis.

## **2.2. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Menurut *Managing Partner The Jakarta Consulting Group*, A.B. Sutanto ([www.jakartaconsulting.com](http://www.jakartaconsulting.com)), perusahaan konsultan sumber daya manusia, mengungkapkan tren kompensasi eksekutif puncak di Indonesia mengarah ke *pay-for-performance*. Keterkaitan antara kompensasi dan kinerja melalui penetapan kriteria-kriteria yang terkait langsung dengan tujuan dan strategi perusahaan sering ditetapkan untuk mengukur prestasi eksekutif puncak adalah perhitungan keuangan hasil operasi

jangka pendek dan mulai diarahkan menjadi kriteria jangka panjang. Misalnya, perusahaan menetapkan *Return on Equity* (ROE) harus dicapai dalam lima tahun, maka eksekutif baru mendapatkan bonus atau insentif yang nilainya disesuaikan dengan target tersebut.

Menurut YPPMI & SC (2002), Sistem pemberian kompensasi dengan tolak ukur kinerja keuangan terkadang menyebabkan eksekutif menjadi oportunistis, yaitu berusaha mencapai target yang telah ditetapkan dengan cara melakukan praktik akuntansi yang kurang sehat. Rekayasa keuangan ini sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang menekankan pentingnya pemilik (*principles*) menyerahkan manajemen perusahaan kepada profesional (*agents*) yang lebih memahami dan mengerti cara untuk menjalankan suatu usaha. Pemisahan ini menyebabkan asimetri informasi (*information asymmetry*) yang mengakibatkan eksekutif mempunyai keleluasan untuk memaksimalkan laba perusahaan yang mengarah pada proses memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan biaya yang harus ditanggung pemilik perusahaan.

Akuntansi berperan dalam menyediakan informasi untuk mengukur kinerja eksekutif, salah satu ukuran yang digunakan adalah laba bersih. Laba bersih dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan *moral hazard* melalui dua cara yang saling melengkapi. Pertama, laba bersih sebagai masukan dalam kontrak kompensasi eksekutif untuk memotivasi kinerja eksekutif. Kedua, laba bersih dapat memberikan informasi kepada pasar modal dan pasar tenaga kerja, sehingga apabila eksekutif melakukan *shirk* akan mengalami penurunan penghasilan, dan mempengaruhi reputasi (Scott 2000).

Menurut Scott (2000), manajemen laba dimungkinkan untuk dilakukan karena fleksibilitas yang dimiliki eksekutif dalam hal pemilihan kebijakan akuntansi untuk



memaksimalkan kepentingannya atau nilai perusahaan. Manajemen laba dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu motivasi bonus (*bonus purposes*), motivasi kontrak lainnya (*other contractual motivations*), motivasi politik (*political motivations*), motivasi pajak (*taxes motivations*), perubahan *chief executive officers* (*changes of CEO*), *Initial Public Offering* (IPO), dan mengkomunikasikan informasi ke investor (*to communicate information to investors*).

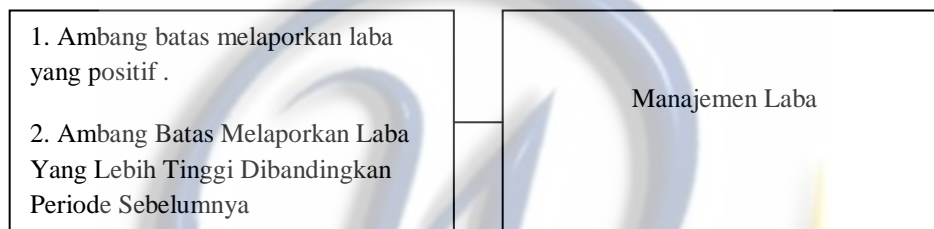
Penelitian empiris Healy (1985) dalam Scott (2000), menguji perencanaan bonus (*bonus plans*) menemukan bukti bahwa eksekutif dengan perencanaan bonus berdasarkan laba bersih mengadopsi secara sistematis kebijakan akrual untuk memaksimalkan bonus yang diharapkan diperoleh. Eksekutif dengan *bonus plans* cenderung memilih prosedur akuntansi yang menggeser pelaporan laba periode mendatang menjadi laba periode berjalan. Eksekutif dengan *bonus plans* diduga akan memilih kebijakan akuntansi yang kurang konservatif dibanding dengan eksekutif tanpa *bonus plans*. Eksekutif dengan *bonus plans* akan menentang standar akuntansi yang mungkin melaporkan laba bersih lebih rendah. Eksekutif menggunakan laba akuntansi untuk menentukan besarnya bonus cenderung memilih kebijakan akuntansi yang memaksimalkan bonus yang diharapkan.

Tiga ambang batas (*Degeorge et al., 1999*) yang mendorong eksekutif untuk melakukan manajemen laba, yaitu melaporkan laba yang positif; melaporkan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan memenuhi prediksi laba dari analis. Apabila eksekutif merespon ambang batas tersebut maka diprediksi akan terjadi manajemen laba. Dalam penelitian ini, hanya dua ambang batas pertama yang

digunakan karena ambang batas terakhir, analisis melakukan ramalan laba hanya pada sebagian emiten saja.

Berdasarkan kajian pustaka baik teoritis maupun empiris, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran: “Mendeteksi manajemen laba dengan menggunakan analisis ambang batas melaporkan laba yang positif dan melaporkan laba yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya” dengan diagram sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis deskriptif penelitian ini adalah terjadinya manajemen laba.